

EVALUASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA

Nuzulia Rahma, Tri Yulianti, Agus Sukristyanto

nuzulia@gmail.com, diazkakan@gmail.com, agusukris@yahoo.co.id

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ABSTRACT

The objective of this research is to evaluate the implementation policy of Surabaya government related to non-smoking area In accordance with the Mayor of Surabaya Regulation No. 25 of 2009 on the Implementation of Local Regulation of Surabaya City Number 5 Year 2008 About Non Smoking Area at RSUD Haji. This research used qualitative descriptive using three informants comprises two visitors of RSUD Haji and one staff of RSUD Haji. The technique of data collections used in this research is observation, interview, and documentation. The results of this study explain that the evaluation of the policy as a functional activity conducted by the researcher states that the functional implementation of the Surabaya City government policy related to non-smoking areas at the RSUD Haji functionally has succeeded. Evaluations focused on policy have also been undertaken by the researcher and he/she found that the implementation of the smoking policy in RSUD Haji area has been implemented in accordance with the provisions. As well as, systematic policy evaluation conducted by the researcher stated that the policy has been running in accordance with provisions and running without any obstacles.

Keywords: *public policy, policy evaluation, RSUD Haji, No-Smoking area*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Surabaya terkait kawasan bebas rokok, sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomer 25 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomer 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Haji. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan tiga informan yang terdiri dari 2 pengunjung RSUD Haji dan 1 staff karyawan RSUD Haji. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Evaluasi kebijakan sebagai kegiatan fungsional yang dilakukan peneliti menyatakan bahwa secara fungsional pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Surabaya terkait kawasan bebas rokok dan kawasan tanpa rokok pada RSUD. Haji secara fungsional telah berhasil. Evaluasi yang fokus pada bekerjanya kebijakan juga telah dilakukan oleh peneliti dan menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan larangan merokok di kawasan RSUD Haji ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Serta, evaluasi kebijakan sistematis yang

dilakukan peneliti menyatakan bahwa kebijakan tersebut telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan berjalan tanpa adanya kendala apapun.

Kata kunci: Kebijakan Publik, Evaluasi Kebijakan, RSUD Haji, Kawasan Bebas Rokok

Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari beberapa kepulauan yang mempunyai wilayah yang terbagi menjadi beberapa Provinsi, Kabupaten dan Kota, masing-masing mempunyai peraturan daerah. Di Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya mempunyai peraturan daerah yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Peraturan tersebut adalah peraturan daerah Kota Surabaya nomor 5 tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok.

Indonesia menduduki peringkat ke-3 dengan jumlah perokok terbesar didunia setelah China dan India yaitu 65 juta perokok atau 28% per penduduk. Di Indonesia prevalensi merokok penduduk usia 15 tahun keatas melonjak dari 27% pada tahun 1995 menjadi 34,7% pada tahun 2010 (Effendi, 2014). Rokok saat ini merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia bahkan di dunia, yang mana diperkirakan hingga menjelang 2030 kematian akibat merokok akan mencapai 10 juta per tahunnya dan di negara-negara berkembang diperkirakan tidak kurang 70% kematian yang disebabkan oleh rokok (Priherdityo, 2017).

Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomer 25 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa kawasan terbatas merokok adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan ditempat khusus. Sedangkan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomer 25 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 Ayat 15 menyebutkan bahwa yang dinamakan rokok adalah hasil olahan tembakau yang terbungkus yang mana termasuk diantaranya adalah cerutu atau bentuk lainya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tambahan-tambahan.

Upaya dalam menciptakan kondisi lingkungan yang sehat bagi masyarakat, pengaturan tentang merokok diruang publik merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Pada dasarnya peraturan yang buat oleh pemerintah kota Surabaya

hanyalah untuk mengatur yang mana bukan berarti melarang. Hanya menempatkan perokok di tempat yang terpisah dari non perokok agar hak non perokok untuk mendapatkan udara yang bersih dapat terwujud.

Pada penelitian ini lokasi penelitian akan dilakukan di Rumah Sakit Umum Haji Kota Surabaya, dengan berdasarkan pada temuan, permasalahan yang terjadi di RSUD Haji Surabaya, permasalahan merokok disembarang tempat terutama ruang publik merupakan hal yang memprihatinkan, pemandangan pengunjung rumah sakit yang merokok diruang publik merupakan pemandangan yang lumrah. Pengunjung yang tak merokok pun hanya diam. Seolah keberadaan asap rokok tersebut tak ada. Sedangkan para perokok sendiri juga tak peduli sekitarnya. Pengunjung yang merokok hanya menikmati setiap batang rokok yang di hisap. Menurut penuturan petugas RSUD Haji pada area-area tertentu telah dipasang tanda khusus yang menyatakan bahwa area tersebut merupakan area yang dilarang merokok, akan tanda tersebut dirasa terlalu kecil sehingga menyebabkan pengunjung seakan abai terhadap larangan tersebut dengan tidak mengganggap keberadaan dari tanda tersebut (Sugiharto, 2017). Untuk mengatasi permasalahan tersebut pihak RSUD Haji mempertegas dan tidak lagi memberikan kesempatan kepada baik pegawai, pasien maupun pengunjung rumah sakit untuk merokok. Pihak rumah sakit tidak akan menyediakan ruangan khusus untuk merokok karena rumah sakit memang kawasan tanpa rokok, ketentuan ini sesuai dengan peraturan Pemerintah Daerah dan Undang-undang yang menyatakan bahwa rumah sakit merupakan kawasan bebas rokok, sehingga kegiatan merokok diruang publik yang selama ini terjadi akan segera ditindak tegas oleh pihak rumah sakit (Taufik, 2009). RSUD Haji selama ini tidak memiliki kawasan atau area yang khusus ditempatkan untuk perokok, sehingga pengunjung merokok di ruang-ruang publik atau bahkan lorong-lorong Rumah Sakit. Belum terimplementasinya peraturan Daerah terkait kawasan bebas merokok dan kawasan terbatas merokok di RSUD Haji, menjadi contoh lemahnya pengawasan pemerintah dalam menindak tegas peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan.

Metode

Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah Deskriptif Kualitatif yaitu dalam penelitian ini lebih menekankan pada makna dan proses daripada hasil suatu aktivitas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian sedang berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penulis memilih Metode Deskriptif Kualitatif untuk mengevaluasi proses implementasi suatu kebijakan kawasan tanpa rokok atau bebas asap rokok.

Analisis data dalam hal ini peneliti dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kejadian-kejadian ditempat penelitian (Sugiyono, 2011:240). Model interaktif Miles & Huberman, yaitu Reduksi data, peneliti melakukan penyederhanaan data yang meliputi catatan lapangan dari observasi dan hasil wawancara dengan cara perangkuman, diteruskan dengan perumusan ke dalam tema yakni : Evaluasi kebijakan terhadap Peraturan Walikota Surabaya Nomer 25 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.

Hasil dan Pembahasan

Penyampaian tentang kebijakan pemerintah kota Surabaya terkait kawasan bebas rokok pada RSUD Haji telah disampaikan kepada pengunjung RSUD Haji. Serta terdapat sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit dengan cara menyediakan papan-papan larangan merokok serta melakukan tindakan peneguran terhadap seseorang yang melanggar peraturan tersebut oleh pihak satpol pp atau satpam dan menginformasikan ke pasien terhadap peraturan larangan merokok di RSUD Haji. Serta adanya sebuah pengumuman yang dilakukan oleh pihak RSUD Haji terkait kebijakan pemerintah Kota Surabaya terkait kawasan bebas rokok pada RSUD Haji, dan pelayanan yang disediakan terhadap kawasan bebas merokok sehingga diharapkan pengunjung tidak merokok di lingkungan RSUD Haji. Salah satu cara pihak RSUD Haji melakukan kebijakan pemerintah Kota Surabaya terkait kawasan bebas rokok yaitu dengan adanya sosialisasi dengan pasien dan melayani pasien

yang sakit agar tidak menggunakan rokok di dalam RSUD Haji. Sarana yang digunakan dalam kegiatan operasional implementasi kebijakan pemerintah Kota Surabaya terkait kawasan bebas rokok dan kawasan tanpa rokok pada RSUD Haji adalah dengan adanya papan pengumuman, pamflet, dan menginformasikan tentang aktifitas rokok di RSUD Haji. Hal tersebut didukung oleh teori Lasswell dan Kaplan dalam Soetomo, (2007:42) di mana kebijakan publik memiliki makna sama sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, pemerintah dalam suatu keadaan lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mewujudkan suatu tujuan.

Berdasarkan pernyataan dari masing-masing informasi yang telah diuraikan di atas, maka dalam hal ini peneliti mengevaluasi bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Surabaya terkait kawasan bebas rokok dan kawasan tanpa rokok pada RSUD Haji secara fungsional telah berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan adanya tanggapan baik itu para pelaksana yang meliputi staff dan pegawai dari RSUD Haji maupun para pengunjung dan pasien RSUD Haji yang merasa senang dengan pelaksanaan peraturan larangan merokok di kawasan tersebut. Hal ini kemudian berdampak pada meningkatnya kualitas udara bersih di lingkungan RSUD Haji yang kemudian turut meningkatkan kenyamanan setiap orang yang ada di dalamnya.

Kondisi yang demikian ini sesuai dengan pendapat Winarno (2012: 230 - 232) yang menjelaskan tipe evaluasi kebijakan sebagai kegiatan fungsional. Sebab, secara fungsional sudah terbukti mampu meningkatkan kenyamanan dari setiap pengunjung, pasien maupun staff dan pegawai RSUD Haji itu sendiri. Selain itu, dalam teori Winarno (2012: 230 - 232) juga dijelaskan terkait evaluasi yang fokus pada bekerjanya kebijakan. Peneliti mengevaluasi bahwa pelaksanaan kebijakan larangan merokok di kawasan RSUD Haji ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, dari diterapkannya dengan baik larangan merokok di kawasan RSUD Haji, menjadikan setiap pengunjung, pasien bahkan para staff dan pegawai RSUD Haji merasa lebih nyaman dibandingkan sebelum diberlakukan larangan merokok di kawasan tersebut. Hal ini karena adanya pelaksanaan kebijakan

pemerintah Kota Surabaya terkait kawasan bebas rokok dan kawasan tanpa rokok yang dilakukan oleh RSUD Haji secara baik. Selain itu, kesuksesan penerapan kebijakan tersebut juga mendapatkan dukungan yang maksimal dari masyarakat sehingga tujuan dari kebijakan tersebut dapat dijalankan secara efisien.

Oleh sebab itu, ketika dievaluasi kebijakan sistematis sebagaimana penjelasan dari Winarno (2012: 230 - 232), maka peneliti dapat menyatakan bahwa kebijakan tersebut telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan berjalan tanpa adanya kendala apapun. Artinya, dengan demikian pelaksanaan pemerintah Kota Surabaya terkait kawasan tanpa rokok ini telah berjalan secara sistematis karena telah berhasil menciptakan kawasan yang bebas rokok dan tanpa rokok yang kemudian membuat nyaman setiap orang yang ada di lingkungan RSUD Haji tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, temuan peneliti dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Evaluasi kebijakan sebagai kegiatan fungsional menyatakan bahwa secara fungsional pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Surabaya terkait kawasan tanpa rokok pada RSUD Haji secara fungsional telah berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan adanya tanggapan baik itu para pelaksana yang meliputi staff dan pegawai dari RSUD Haji maupun para pengunjung dan pasien RSUD Haji yang merasa senang dengan pelaksanaan peraturan larangan merokok di kawasan tersebut.
2. Evaluasi yang fokus pada bekerjanya kebijakan menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan larangan merokok di kawasan RSUD Haji ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaannya lebih baik dari sebelumnya. Hal ini dapat ditunjukkan dari diterapkannya dengan baik larangan merokok di kawasan RSUD Haji, menjadikan setiap pengunjung, pasien bahkan para staff dan pegawai RSUD Haji merasa lebih nyaman dibandingkan sebelum diberlakukan larangan merokok di kawasan tersebut.

3. Evaluasi kebijakan secara sistematis menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan berjalan tanpa adanya kendala apapun. Artinya, dengan demikian pelaksanaan pemerintah Kota Surabaya terkait kawasan bebas rokok dan kawasan tanpa rokok ini telah berjalan secara sistematis karena telah berhasil menciptakan kawasan yang bebas rokok dan tanpa rokok yang kemudian membuat nyaman setiap orang yang ada di lingkungan RSUD Haji tersebut.

Daftar Pustaka

- Admin. (2015). *Teori Efektifitas*. catatan info.
- Agustino, L. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabetha
- Effendi, T. (2014, September 11). *Indonesia Peringkat 3 di Dunia*. Dipetik April 18, 2017, dari Kompasiana: <http://www.kompasiana.com>
- Erwin Zubair Gobel, Y. P. (2016). *Pengelolaan Danau Limboto Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Fadlurrahman, L. (2014). Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, Vol. 18 No. 2.
- Hakim, M. L. (2015, Volume 3, Nomor 1). Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Surabaya. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 1-1 *Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*.
- Wulanningrum, P. A. (2016). *Evaluasi Penerapan Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang*. Semarang.
- Zahrina. (2015). *Evaluasi Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Universitas Indonesia Depok*.